

DARI WITTENBERG KITA SEMUA TERPANGGIL MEMBARUI DUNIA 1517 - 2017



Penyunting
YUSAK SOLEIMAN

DARI WITTENBERG KITA SEMUA TERPANGGIL MEMBARUI DUNIA 1517 - 2017

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun,
termasuk fotocopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.
(sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002)

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyunting
YUSAK SOLEIMAN



Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420, Indonesia
Telp. 021-3901208, Fax. 021-3901633
www.bpkgunungmulia.com

DARI WITTENBERG KITA SEMUA TERPANGGIL MEMBARUI DUNIA 1517-2017

Copyright © 2017 oleh Yusak Soleiman
All rights reserved

PT BPK Gunung Mulia, Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420

Bekerja sama dengan Eukumindo

E-mail: publishing@bpgkm.com – http://www.bpgkungunungmulia.com

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Cetakan ke-1: 2017

Editor: Windiasih Sairoen

Korektor Naskah: Rika Uli Napitupulu-Simarangkir

Tata Letak Isi: Varian

Desain Sampul: Hendry Kusumawijaya

Katalog dalam terbitan (KDT)

Soleiman, Yusak

Dari Wittenberg kita semua terpanggil membarui dunia 1517-2017 /

oleh Berthalya Br. Tarigan, Cornelis Adolf Alyona, Jozef M. N. Hehanussa, *World Communion of Reformed Churches* (diterjemahkan oleh Zakaria J. Ngelow) Zakaria J. Ngelow, Dr. Pdt. Ebenhaizer I. Nuban Timo, Uwe Hummel, Yusak Soleiman, Pdt. Sientje Latuputty, D.Th., Yusak Soleiman and Huub Lems.

– Cet. 1. – Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.

viii + 260 hlm.; 21 cm.

1. Tokoh - Sejarah Gereja.

2. Reformator.

I. Judul.

252

ISBN 978-602-231-452-3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
1. Alkitab di Tangan Reformator dan Relevansinya Bagi Gereja Protestan Masa Kini.....	1
2. Relevansi Ajaran Zwingli di Indonesia pada Masa Kini	25
3. Perjamuan Kudus yang Kontekstual: 500 Tahun Pascareformasi Gereja.....	43
4. <i>Introduction to The Major Motives of The Reformers</i>	75
5. Pengantar ke dalam Alasan-alasan Utama Para Reformator	103
6. Reformasi dan Perpecahan Gereja Abad ke-16: Suatu Perspektif Ekumenis	133
7. Gereja Bertindak Terhadap Sang Lain	151
8. Imamat Am Orang Percaya sebagai Kekuatan Jemaat Misioner: Sebuah Inspirasi dari Martin Luther	185
9. Jabatan Gerejawi (Khususnya <i>Ordained Ministry</i>) dalam Perspektif Sejarah Kekristenan	209
10. Reformasi Luther dan Imamat Am Orang Percaya	233
11. <i>Unification of Lutheran and Reformed in 19th Century Batavia as Initiated by The King of The Netherlands</i> (Gereja Immanuel)	243

KATA PENGANTAR

PENERBITAN BERSAMA

PARA DOSEN SEJARAH GEREJA DAN
TEOLOG PESERTA STUDY TOUR EUKUMINDO
MENYAMBUT REFORMASI 500 TAHUN

di Jerman dan Swiss, Agustus 2016

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang kedua dari para peserta study tour. Kumpulan tulisan pertama telah diterbitkan sebagai edisi khusus dari Jurnal yang diterbitkan oleh UEM/VEM. Para penulis menyampaikan penghargaan atas dukungan EUKUMINDO dalam proyek penerbitan ini. Kita semua berharap agar penerbitan ini dapat menjadi salah satu sumber bacaan yang penting bagi gereja-gereja dan sekolah-sekolah teologi di Indonesia.

Momentum peringatan 500 tahun dimulainya gerakan reformasi yang dirayakan dengan berbagai cara di seluruh bumi ini, kiranya dapat menginspirasi kita semua untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi panggilan sejarah pembaruan yang menjadi tugas generasi kita. Kiranya kita tidak hanya terpesona melihat segala persoalan dan hal-hal besar yang telah terjadi selama 500 tahun terakhir dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan keagamaan, melainkan kita dapat secara kritis dan konstruktif memberi diri bagi gerakan pembaruan dalam generasi kita.

Yusak Soleiman, Ph.D.

Jabatan Gerejawi (Khususnya *Ordained Ministry*) dalam Perspektif Sejarah Kekristenan

*Pendekatan Segitiga: Tradisi, Organisasi,
dan Konteks.*¹

Yusak Soleiman²

Ada banyak sudut pandang sejarah untuk mendekati subjek Jabatan Gerejawi dalam perjalanan sejarah kekristenan. Untuk percakapan kali ini saya menganjurkan kita mendekatinya dari tiga sudut pandang: tradisi, organisasi, dan konteks. Dua yang pertama adalah pendekatan yang paling sering dipergunakan di dalam berbagai tradisi gereja. Misalnya istilah *apostolic succession* sudah berbicara sangat jelas betapa tradisi adalah konsep dasar yang penting. Pemisahan dan penamaan jabatan-jabatan tertentu di dalam gereja dengan sangat jelas memperlihatkan pentingnya organisasi, atau bahkan hierarki di dalam percakapan mengenai jabatan gerejawi. GKI pernah ingin menghapus semua jabatan gereja kecuali jabatan penatua atau tua-tua. Hal ini sejalan dengan kegandrungan GKI dengan persoalan organisasi.

¹ Naskah ini aslinya dipresentasikan dalam Diskusi Teologis Komisi Pengkajian Teologi GKI, Senin 10 Juni 2013.

² Anggota KPT GKI; Pendeta GKI; Sejarawan pada Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia dan dosen di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Belajar sejarah di Universitas Leiden dan Vrije Universiteit Amsterdam, sejak 2003; belajar teologi di STT Jakarta dan Universitas Groningen, sejak 1984, belajar tentang kehidupan gereja sejak 1982.

Dalam tulisan pendek ini saya akan melakukan tugas sebagai sejarawan, yaitu memberikan perspektif atas perkembangan percakapan dan praktik yang dijalankan gereja-gereja menyangkut jabatan gerejawi. Tiga pendekatan ini akan menolong kita untuk menempatkan berbagai konsep dan pemberlakuan jabatan gerejawi yang berbeda-beda maupun yang memiliki kemiripan satu sama lain di dalam beberapa periode dan bermacam-macam komunitas yang mempraktikkannya. Kita akan memeriksa pilihan-pilihan yang pernah diambil dan dipergunakan di GKI, dan mencoba memahami mengapa GKI memilih yang satu dan bukan yang lain. Kita akan memeriksa apakah pilihan-pilihan tersebut lebih cocok dibanding kemungkinan lainnya.

Pendekatan Tradisi

Teologi imamat am orang percaya telah membongkar tradisi panjang kekristenan Barat pada Abad Pertengahan yang menciptakan kesenjangan antara umat dan imam. Gereja-gereja Protestan yang menerima teologi imamat am, memilih dan mengangkat dari antara anggota mereka untuk memangku jabatan kependetaan.

Burrows menyajikan dengan menarik hasil pembacaannya atas hasil penelitian Hans von Campenhausen, Hans Conzelmann, Eduard Schillebeckx, dan Carl Peter dari akhir 1960-an dan awal 1970-an. Ia menyatakan baik tradisi Katolik maupun Protestan dapat terjebak pada sejarah palsu (*a-historical*), bila mempertahankan posisi jabatan klasik atau mengklaim bahwa jabatan yang diberlakukan berdasarkan gereja pada zaman Perjanjian Baru. Padahal perkembangan yang berkelanjutan dan cenderung seragam atas jabatan-jabatan gerejawi barulah dimulai pada abad IV (Burrow, 77). Ia juga mengingatkan kelemahan umum dalam studi mengenai jabatan gerejawi adalah 1) pengabaian konteks apostoliknyanya, dan 2) mentalitas apologetik – yang mengklaim bahwa imamat dan keuskupan merupakan jabatan yang berasal dari Gereja Perdana. Pendekatan lama seperti ini, setidaknya yang dalam

pandangan Burrow masih banyak ditemukan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an ketika ia menulis bukunya, sekalipun di kalangan akademis sudah mulai ditinggalkan, namun belum terlalu tampak dalam cara berpikir dan praktik di kalangan para klerus Katolik maupun Protestan (Burrow, 79-80).

Mengenai istilah apostolik, menurutnya ada dua cara penggunaan: 1) secara teologis – sebagaimana yang muncul dalam tulisan Lukas dan Paulus, dan 2) secara gerejawi (*ecclesiastical usage*) sebagaimana yang dihidupi oleh *the Twelve* – pemimpin pertama Gereja Perdana, yang sekaligus memimpin dan menjadi penginjil. Istilah-istilah ini bersifat retrospektif, artinya kita yang mengenakan pada orang dan situasi di masa lalu, padahal mereka yang hidup pada masa itu tidak membuat pembedaan seperti yang kita lakukan (Burrow, 80). Dalam studi sejarah kekristenan kita mengenal para bapa rasuli (bapa apostolik). Mereka bukanlah *the Twelve*. Menurut tradisi – sama halnya seperti *the Twelve* yang masuk dalam ranah tradisi – para bapa rasuli adalah murid-murid dari para rasul. Kemunculan dan karya-karya mereka pada sekitar akhir abad pertama memperkenalkan kepada kita istilah *apostolic succession*. Pada masa ini berlangsunglah suatu krisis yang akan mendefinisikan perjalanan kekristenan selanjutnya. Gnostisisme yang menekankan pengetahuan rahasia yang diturunkan secara eksklusif ditentang oleh para bapa rasuli yang berdiri dalam tradisi rasuli (*apostolic tradition*) yang sekaligus pewarisannya berlangsung secara terbuka (*public*) (Burrow, 81).³ Para pewaris rasuli pada akhir abad pertama dan awal abad II memperlihatkan kekhasan masing-masing berdasarkan corak spiritualitas dan budaya lokal dari wilayah masing-masing: di Roma – sang imam adalah pejabat tinggi pelaksana upacara keagamaan (*the supreme cultic official*); di *Syria* – ia adalah panutan spiritual dan pusat kehidupan sakral; di Asia Kecil – ia adalah pengkhotbah ajaran rasuli. Mereka semua seperti yang disaksikan oleh sejarah kekristenan bertujuan melawan para pembelot,

³ Saya membuat perbandingan seperti ini: *Gnostic vs. Apostolic fathers = private revelation vs. public, apostolic tradition* → *public service of ordination vs. private lessons or 'ngelmu' from the master to his successor.*

antara lain gerakan Gnostik Kristen. Panggilan dan tugas para pewaris rasuli ini adalah mempertahankan kesatuan dan kerasulan di tengah perkembangan pesat kekristenan. Sekalipun demikian kerasulan (*apostolicity*) adalah milik bersama seluruh gereja, bukan hanya para pemimpinnya (yang ditahbiskan/*ordained*), dan belum ada kebutuhan akan keseragaman (Burrow, 81-83).

Tiga jabatan yang sering disebut hingga saat ini *episkopos*, *presbyteros*, dan *diakonos*, harus dipahami dalam konteks historisnya, untuk menghindari pemutlakan maupun pe-nisbi-an jabatan-jabatan ini. Salah satu soal paling serius pada Reformasi abad XVI adalah kebekuan dalam tradisi gereja Barat pada Abad-abad Pertengahan dan penghakiman yang tanpa ampun dari para reformator angkatan pertama terhadap tradisi jabatan gerejawi – yang akhirnya menimbulkan komplikasi yang diwarisi oleh gereja-gereja Protestan dan pecahan-pecahannya hingga hari ini. Burrow dengan menggunakan studi dari Schillebeeckx menjelaskan penolakan para reformator atas struktur gereja yang hierarkis berasal dari ketidakpuasan atas otoriterisme dalam gereja yang semakin luas pada akhir Abad-abad Pertengahan, yaitu dengan kokohnya episkopalisme, jabatan keuskupan, terutama uskup Roma. Penelusuran historis akan menemukan bahwa perkembangan menguatnya *episkopos* mulai berkembang terutama sejak abad III, ketika para uskup dianggap sebagai penerus dari para rasul. Istilah penerus tentu saja dipahami secara teologis, dan bukan historis. Cyprianus dalam pergumulan pada zamannya, memang cenderung memperkuat *episkopos* dan menempatkan para penatua dan diaken sebagai pendamping yang lebih rendah dari para uskup. Hal ini dilakukannya untuk menjawab krisis pada zamannya, namun oleh generasi yang kemudian dipergunakan sebagai dasar teologis dan historis untuk keabsahan salah satu jabatan gerejawi (Burrow, 85-87).

Terlepas dari sumbangan khas Cyprianus, setidaknya sebelum abad IV, dalam pluralitas kekristenan baik di Timur (berbahasa Yunani) maupun di Barat (berbahasa Latin), terlihat dialektika yang menarik.

Para pejabat gerejawi dicurahi (*anointed by*) Roh Kudus dan diterima (*approved by*) komunitas untuk menjalankan tugas di mana Kristus adalah Tuhan gereja, dan untuk membimbing umat mencapai kepenuhannya sebagai Tubuh Kristus. Di satu pihak sang pejabat ditahbis untuk *represents Christ' over against' the community*. Berarti ia memiliki otoritas Kristus untuk memimpin. Namun di pihak lain, *the ordinand represents the community*. Dan karena itu ia bukanlah pemimpin yang memiliki otoritas di atas umat. Bila hanya yang pertama yang ditekankan, maka sang pejabat terjebak pada hierarkialisme. Sebaliknya, jika yang pertama diabaikan, ia akan terjebak pada kongregasionalisme (Burrow, 87-88).

Gereja Barat sepanjang Abad-abad Pertengahan yang kurang lebih satu milenium itu, secara pasti mengarahkan diri menjadi gereja para imam dan uskup. Memang kemudian dalam tradisi Protestan ada usaha untuk mengembalikan tiga jabatan itu, namun kita tetap kurang berhasil untuk menemukan keseimbangan yang tepat.

Burrow menggunakan hasil studi James A. Mohler dan David Power untuk menjelaskan perkembangan jabatan imam dalam tradisi awal kekristenan. Kekristenan pada mulanya berusaha menghindari jabatan imam (*priest*), untuk menegaskan perbedaan mereka dengan tradisi keagamaan lain di sekitar mereka: imam menurut tradisi tua Yudaisme, dan imam di dalam kepelbagaian tradisi Yunani-Romawi. Pilihan yang dipergunakan justru berasal dari sistem pemerintahan umat Yahudi, yaitu dewan penatua atau sanhedrin, yang juga disebut *presbyteroi* (Yun.) atau *zeqenim* (Ibr.). Dewan ini – seperti banyak organisasi keagamaan pada zamannya – mengurus seluruh kehidupan umat, keagamaan maupun hidup sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pemberlakuan *Torah*. Berbeda dengan pemahaman kita yang sudah 'dicemari' oleh teologi Perjanjian Baru, *Torah* bukan sekadar hukum, bahkan juga bukan hukum ilahi. Melainkan ia adalah sekaligus pernyataan diri Allah dan jawaban umat terhadap kebaikan Allah (Burrow, 93-94).⁴

⁴ Hal ini dapat dijumpai dalam beberapa Mazmur yang mengagungkan *Torah*. Dan memanglah hal ini terasa aneh bagi orang-orang Kristen yang memiliki antipati terhadap *Torah*, berdasarkan pembacaan atas beberapa Surat Rasul dan Injil.

Para penatua anggota sanhedrin, memimpin, menerapkan disiplin, bahkan berhubungan dengan pihak pemerintah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan umat dengan baik. Para penatua ini tak memiliki jarak yang jauh dengan umatnya. Ternyata baik penatua Yahudi maupun penatua Kristen memiliki beberapa kemiripan, setidaknya pada abad pertama.⁵ Hal itu menyangkut persyaratan untuk pemilihan dan pengangkatan penatua, dan juga tugas-tugas mereka. Pada tahap ini seorang uskup (penilik-LAI) masih merupakan bagian, bahkan anggota dari dewan penatua, dan belum menjadi sosok monarkis yang mengatasi anggota lainnya. Dalam tulisan-tulisan sezaman lainnya juga ditemukan bahwa para penatua Kristen – seperti halnya para penatua dalam Yudaisme – ditahbiskan dengan upacara penumpangan tangan di hadapan umat. Untuk waktu yang cukup panjang, kekristenan menghindari penggunaan imam, kecuali untuk Kristus sendiri. Baru-lah pada abad II dan III, kita menemukan imam pada jabatan uskup, dan kemudian juga pada para penatua dan diaken (Burrow, 94-100). Saya kira hal ini terkait dengan banyak hal, penambahan jumlah anggota, perkembangan ritus Kristen, mulai dibedakannya antara tugas keagamaan dan urusan sehari-hari (*sacred and secular*).

Melalui tulisan-tulisan Cyprianus kita menemukan bahwa pada pertengahan abad III, uskup, selain menjadi lambang kesatuan gereja, juga sudah mempraktikkan fungsi imam, dan menjadi lebih utama dibanding para penatua lainnya. Hak melayankan sakramen ada pada imam, yaitu uskup. Meskipun pada zaman yang bergolak, Cyprianus dapat juga menerima kenyataan bahwa para penatua, menjalankan fungsi imam tersebut. Namun perkembangan ke arah ini tidaklah seragam dan dalam kecepatan yang sama. Pada beberapa komunitas Kristen lainnya, proses menguatnya jabatan imam, mula-mula pada uskup, dan kemudian juga pada penatua, berlangsung secara berbedabeda. Ada catatan bahwa hingga abad VIII masih ada imam yang beristri. Hal ini memperlihatkan betapa tradisi *Jewish Elder* yang para imamnya

⁵ Berdasarkan *Babylonian Talmud*, Sanhedrin, I, 17a dan Titus 1:5-9.

memang menikah⁶ dan berkeluarga, ternyata masih berlaku. Sekalipun hal ini menjadi semakin terdesak dengan menguatnya hierarki-monarkis dalam tradisi kekristenan Barat sepanjang Abad-abad Pertengahan. Uskup berkembang menjadi imam utama (*high priests*) dan para penatua menjadi imam pembantu (*subordinate priests*) (Burrow, 100-102).

Dalam periode panjang Abad-abad Pertengahan berlangsunglah proses formalisasi dan institusionalisasi jabatan gerejawi ini. Burrow meringkasnya demikian:

1) *bishops became high priests in their dioceses*; 2) *Roman primacy came to be universally recognized*; 3) *priest-presbyters became pastors of the ordinary communities of faithful*; 4) *the diaconate disappeared as a general pastoral ministry in the 'parishes'*; 5) *monastic influence gradually began to affect the practice and understanding of clerical lifestyles and piety* (Burrow, 102-103).

Sikap dan teologi Hieronymus (Jerome) dan Agustinus yang cenderung sangat mencurigai seksualitas mendorong terbentuknya tradisi selibat di kalangan para imam (uskup dan penatua). Hal ini baru menjadi norma universal pada abad XII. Reformasi kebiaraan yang berlangsung pada Abad-abad Pertengahan turut mendorong idealisme yang semakin tinggi bagi para pemangku jabatan gerejawi. Tradisi monastik Benediktin, dan kemudian kemunculan tarekat Franciscan dan Dominikan, serta banyak dari para biarawan (*monks*) ini yang diangkat menjadi uskup, mengarahkan kecenderungan pada idealisme bahwa *monk is what a priest ought to be* (Burrow, 103).

Kekristenan Barat ketika Reformasi abad XVI terjadi adalah kombinasi persoalan yang rumit, termasuk di dalamnya persoalan dengan jabatan gerejawi. Imam utama umumnya tidak hidup dekat dengan umat, sekalipun kehidupannya dibiayai oleh uang dan harta milik gereja. Umumnya mereka orang-orang yang memperoleh pendidikan yang

⁶ Tentu saja menarik menelusuri perkembangan konsep dan praktik selibat para pejabat gerejawi dalam hal ini. Namun kita simpan saja dulu pokok yang satu itu untuk kesempatan lain.

baik dan terhormat. Umat hidup dan didampingi oleh para imam lokal yang umumnya tidak terdidik dengan baik, bahkan tak jarang mereka pun hidup sama buruknya dengan yang terburuk dari antara umat: pemabuk, penuh takhayul, memiliki gundik, dan lain sebagainya. Sekalipun dalam perkembangan teologi pada puncak Abad-abad Pertengahan (dengan tradisi skolastiknya) dan pada akhir Abad Pertengahan menunjukkan diskusi teologis yang menarik, namun hal tersebut merupakan salah satu saja dari gambaran situasi kekristenan Barat, yaitu dari sisi para pemimpin, ilmuwan, atau teolog, dan para bangsawan. Di sisi lain, umat yang dilayani oleh para imam lokal, tak jarang hidup dengan bagian buruk atau terburuk dari kekristenan yang penuh dengan pembelotan, realitas magis penuh takhayul, bahkan juga terhadap ritus yang diselenggarakan oleh gereja. Hal ini antara lain juga tergambar dalam pandangan para teolog pada era ini: para imam adalah pihak aktif yang menyelenggarakan keselamatan yang dipercayakan Allah melalui gereja; umat adalah pihak pasif yang menerima anugerah itu. Gereja terbagi di antara yang memiliki kekuatan aktif dan yang pasif (Burrow, 102-105).

Calvin datang ke Jenewa adalah suatu ketepatan yang luar biasa antara waktu dan tempat. Kota ini – sama seperti beberapa kota lain di sekitarnya – melawan kekuasaan *prince-bishop* sebagai suatu revolusi politis, yang berkembang menjadi revolusi keagamaan. Kekuasaan di dalam negara-kota (*canton*) ini jauh lebih rumit daripada yang biasa diajarkan dalam pembahasan mengenai reformasi Yohanes Calvin. Dewan Kota bukanlah kelompok elit, melainkan perwakilan seutuhnya dari kota itu sendiri. Ada empat tingkat (*four chambers*) kekuasaan, yang semuanya adalah kepemimpinan kolektif (Kingdon, 90-91). Dari sini kita bisa memahami bahwa tradisi kepemimpinan kolektif tidak lahir begitu saja dari kejeniusan seorang Calvin.

Jenewa yang justru bergabung dalam gerakan Reformasi memiliki kecurigaan bahkan penolakan terhadap sistem hierarki-monarkis, entah itu kekaisaran, entah itu gereja Roma. Sistem yang kemudian diperguna-

kan pada banyak negara modern-demokratis yang sering diklaim sebagai terilhami dari tradisi Calvinis, sesungguhnya adalah eksperimen dari komunitas-komunitas seperti Jenewa ini. Di bawah kendali dewan kota, terdapat konsistori (majelis jemaat) dan *Procurators for the General Hospital*. Dan kedua lembaga ini mengurus dua aspek berbeda dari kehidupan umat Kristen penduduk kota. Konsistori mengawal kehidupan agar semua orang dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen. *Procurators* – kalau dalam tradisi gereja Belanda (seperti yang saya ceritakan dalam *Pangumbaran ing bang wetan*) mereka disebut sebagai *weeskamer* – mengurus orang-orang dan keluarga miskin di kota.⁷ Ini berarti gereja pada zaman Calvin dan sesudahnya mempraktikkan pola kepemimpinan kolektif (yang aristokratis), karena hal ini tidak bertentangan secara teologis, tetapi juga terutama karena pemerintah yang ada mempraktikkan hal ini (Kingdon, 93-95). Nah tentu ada pertanyaan: bagaimana dengan gereja-gereja 'Calvinis' di perantauan yang hidup pada negara-negara kerajaan, bahkan dengan pemimpinnya yang hanya menerima Gereja Roma sebagai agama resmi di wilayahnya? Untuk itu dibutuhkan pembahasan tersendiri, yang akan memperlihatkan temuan-temuan yang inspiratif, mungkin saja cocok dengan situasi intoleransi yang menjadi agenda gereja dan masyarakat Indonesia di awal abad XXI ini.

Di Jenewa dan dalam *Institutio* Calvin kita menemukan empat jabatan pelayanan, yang masing-masing dibayangkan merupakan anggota dari badan yang sama, yaitu konsistori (majelis jemaat): gembala (*pastors*), pengajar (*doctors*), penatua (*elders*), dan diaken (*deacons*). Para gembala memberitakan firman dan melayani sakramen, dan mereka selain menjadi anggota konsistori, juga bergabung dalam *a Company of pastors*.⁸ Para pengajar melakukan studi mendalam atas Kitab Suci dan mengajarkannya kepada mereka yang mempersiapkan diri untuk

⁷ Istilah *Hospital* di sini tidak bisa diterjemahkan secara harfiah sebagai Rumah Sakit. Istilah ini dalam pengertian masyarakat *early modern* (modern perdana, abad XIV/XV hingga abad XVIII) adalah istilah yang merangkum seluruh aktivitas belarasa dari penguasa bahkan yang dipercaya sebagai amanat dari Allah sendiri untuk anggota masyarakat yang lemah: miskin, sakit, yatim-piatu, janda, cacat, dan seterusnya.

⁸ Di lingkungan GKI kita menyebutnya sebagai konven pendeta.

pelayanan. Di Jenewa sebelum kedatangan Beza, Calvin satu-satunya pengajar yang melakukan hal ini. Jabatan penatua dan diaken selain jabatan dan fungsi gerejawi, sesungguhnya juga jabatan dan fungsi sekular. Hal ini tidak terlalu asing, bila kita dapat membedakan cara hidup orang pada era *early modern* yang masih belum lepas dari pandangan dunia holistik dalam *Christendom* Abad-Abad Pertengahan, dengan zaman kita sendiri yang sudah melewati Abad Pencerahan – abad XVIII – dan hidup di dunia modern (abad XIX hingga sekarang).⁹ Para diaken diambil dari antara para *Procurators* kota, dan para penatua adalah sebagian dari sekian banyak dewan kota yang secara periodik bergantian duduk di dalam konsistori. Satu hal penting yang sangat sering dilakukan secara salah oleh gereja-gereja tradisi Calvinis di Indonesia, adalah bahwa jabatan diaken sekaligus adalah jabatan yang hanya diperuntukkan bagi orang yang lebih muda, atau yang kurang terhormat dibanding mereka yang menjabat sebagai penatua. Justru orang yang menjabat sebagai *procurators* kota dan kemudian menjadi diaken, adalah orang-orang kaya dan terhormat (Kingdon, 95-96).

Siapakah para pastor atau gembala dari generasi pertama yang hidup pada era Reformasi abad XVI ini? Di Jenewa, kita melihat sosok seperti Calvin dan Beza, dan juga para gembala lainnya, mereka umumnya berasal dari keluarga terhormat. Satu ciri yang menonjol adalah latar belakang pendidikan tinggi yang mereka nikmati. Di masa mudanya Calvin bisa menikmati pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan sangat baik, karena ia memperoleh *beneficies*, semacam beasiswa yang diambil dari keuangan dan usaha yang dijalankan oleh satu jemaat atau oleh satu wilayah untuk membiayai calon pejabat tinggi gereja. Dan hal ini hanya bisa terjadi melalui hubungan kekerabatan dengan pejabat tinggi gereja atau bila yang bersangkutan berasal dari keluarga bangsawan (Kingdon, 99).

⁹ Dalam *Pangumbaran ing bang wetan*, bisa dilihat bagaimana komunitas Protestan di Jawa pada pertengahan hingga akhir abad XVIII, dengan berpusat di Semarang, hidup dan mempraktikkan hal-hal yang sama dengan di Belanda, dan yang peta-birunya sudah tergambar dalam tradisi yang dimulai kota Jenewa dan Calvin pada paruhan kedua abad XVI.

Schorn-Schütte secara jeli mencatat perbedaan di antara para *pastoral clergy* dan orang-orang terhormat yang dipersiapkan untuk jabatan yang lebih tinggi seperti Calvin. Untuk para imam lokal, gereja tidak membutuhkan mereka memiliki kompetensi teologis dan kemampuan berkhotbah. Tugas utama mereka ... adalah dalam hal sakramental dan disiplin, bukan doktrinal. Sehingga tidak mengherankan hampir semua imam pada masa pra-Reformasi tidak memiliki bekal pendidikan teologi yang luas dan mendalam. Hanya sedikit saja, yaitu para *higher clergy*, yang perlu memiliki kemampuan tersebut. Dua generasi pertama para klerus Protestan diambil dari kalangan seperti ini (bekas biarawan dan bekas imam lokal), dengan segala kerumitannya (Schorn-Schütte, 444-445).

Menanggapi situasi bergolak pada abad XVI, baik gereja Roma Katolik maupun gereja-gereja Reformasi, yang setidaknya pada dua generasi pertama, masih tergantung pada *pastoral clergy*, dengan segala kelemahannya itu, dan mulai membenahi proses seleksi dan pendidikan bagi para klerus generasi baru. Para pemimpin seperti yang terlihat di Jenewa, berasal dari keluarga kelas atas (aristokrat), yang terdidik sangat baik, nah bagaimana dengan posisi 'pekerja lapangan'?

Situasinya tidak jauh berbeda dengan situasi pra-Reformasi, yaitu kaum miskin di pedesaan tetap tidak memiliki kesempatan untuk memasuki fungsi *pastoral clergy*. Namun, bagi mereka yang berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi di pedesaan, petani pemilik tanah misalnya, atau kelas menengah perkotaan (*urban bourgeoisie*), serta para tenaga terdidik kelas menengah, peluang untuk masuk itu ada. Motivasinya, sama seperti pada era pra-Reformasi, yaitu kebutuhan dan pencapaian ekonomis. Sekalipun dewan kota atau para pangeran Protestan sudah menyita tanah, gedung gereja dan seluruh milik gereja Roma yang ada di wilayah mereka, sumber-sumber ekonomi ini masih bisa dimanfaatkan bagi para klerus yang direkrut oleh para pangeran atau dewan kota (Schorn-Schütte, 445-446).

Ada temuan menarik menyangkut kalangan para klerus Protestan, yang berasal dari kalangan non-aristokrat. Jabatan gerejawi dipergunakan sebagai batu loncatan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Menjadi pendeta Protestan berarti keluar dari situasi dan status sosial yang diwarisi dari generasi sebelumnya.¹⁰ Sekalipun demikian para pendeta Protestan ini tetap tidak bisa masuk ke kalangan yang lebih tinggi lagi, kecuali ia memang berasal dari lingkaran aristokrat atau berhasil mendapatkan istri dari lingkaran tersebut. Menyangkut perkembangan pendidikan untuk para calon pendeta (Protestan) dan imam (gereja Roma Katolik), masing-masing memulai secara serius usaha ini pada abad XVI dan XVII, dengan sistem patronase dari para penguasa wilayah masing-masing. Tujuannya untuk: 1) memperkuat posisi dan argumentasi konfesional masing-masing pada era yang penuh dengan perang propaganda ini; dan 2) meningkatkan harga diri kaum klerus itu sendiri (Schorn-Schütte, 450-453).

Di Belanda, universitas tertua adalah Leiden. Universitas ini menjadi salah satu produsen yang penting para calon pendeta berpendidikan tinggi di Belanda, begitu negeri ini merangkul Protestantisme. Pendidikan seperti apa yang harus ditempuh oleh para calon atau peminat posisi pendeta Protestan ini? Dan apakah kelulusan dari universitas merupakan syarat untuk menjadi calon pendeta? Di wilayah Jerman bagian utara pada akhir abad XVI terdapat 80% pendeta Protestan yang adalah lulusan universitas. Dan bagi gereja-gereja Protestan sertifikat pendidikan tinggi dipersyaratkan di dalam tata gereja, namun bukan merupakan syarat mutlak untuk penahbisan yang dilakukan oleh gereja-gereja lokal. Artinya di kalangan para pemimpin tertinggi, pendidikan tinggi adalah mutlak bagi para calon pendeta, sekalipun gereja-gereja lokal bisa menimbang sendiri untuk menerima hal tersebut atau bernegosiasi. Yang menarik adalah ini: pada pertengahan abad XVII hampir semua pendeta Protestan adalah mereka yang pernah menjalani pendi-

¹⁰ Selama menjadi dosen di STT, saya mengamati hal ini rupanya masih menjadi gejala yang umum bahkan hingga hari ini.

dikan di universitas, namun selama studi mereka tidak diwajibkan masuk dalam fakultas teologi. Artinya sertifikat kelulusan, entah dari fakultas teologi atau fakultas sastra, tidak merupakan persyaratan mutlak. Hal ini bisa dipahami bila melihat perjalanan karier yang khas dari seorang muda hingga menjadi seorang pendeta: setelah menempuh sekolah Latin (*grammar school*) dan pendidikan bachalerus, maka pada usia 20 tahun ia siap memasuki salah satu fakultas;¹¹ menjalani pendidikan tahap ini adalah sekitar tiga atau empat tahun; tahap berikutnya tidak langsung ke gereja, melainkan bekerja dulu dalam bidang non-gerejawi, sebelum masuk menjadi calon pendeta; dan pada abad XVII seseorang ditahbiskan ke jabatan pada umumnya berusia di atas 33 tahun (Schorn-Schütte, 456-457).

Proses penahbisan selalu melibatkan dua pihak. Sang patron dan konsistori.¹² Calon haruslah pertama-tama diterima oleh sang patron, pada zaman Calvin di Jenewa, hal ini berarti penerimaan oleh Dewan Kota. Sesudah itu barulah konsistori melakukan ujian, untuk menjajaki kemampuan dan kesiapan sang calon. Di kalangan gereja-gereja Protestan, hingga akhir abad XVIII tidak ada sentralisasi penempatan. Urusan pemanggilan hingga penahbisan sepenuhnya urusan jemaat lokal dan klasis. Hal ini konsisten dengan sikap anti terhadap kekuasaan sentralistik yang dianggap hierarki-monarkis¹³ (Schorn-Schütte, 458).

¹¹ Pendidikan di Eropa, yang sekarang disebut sebagai model pendidikan klasik, yang masih sempat saya jalani sebagian di akhir tahun 1990-an – namun sudah dihapuskan sejak pertengahan 2000-an – adalah proses pendidikan yang langsung menghasilkan Magister (dalam model pendidikan modern ala Amerika/Inggris). Artinya semua pendeta Belanda sebelum masuk proses gerejawi wajib bergelar *doctorandus* atau Master of Arts atau Master of Theology.

¹² Sebagai sejarawan saya sering menemukan diskusi a-historis bertema mimbar dan takhta, atau konflik antara gereja dan negara, yang diterapkan begitu saja pada kasus-kasus di era *early-modern* (khususnya pada abad XVI-XVIII). Konsep pemisahan adalah konsep modern (abad XIX-XX), sumbangan menarik dari tradisi reformasi adalah pembedaan atau pembagian tugas, namun belum sampai kepada pemisahan.

¹³ Dan Negeri Belanda sendiri hingga akhir abad XVIII memang berbentuk republik. Baru pada abad XIX Negeri Belanda menjadi kerajaan (seperti Roma yang bermula dari republik lalu berubah menjadi kerajaan); dan menariknya dengan perubahan sistem pemerintahan Belanda muncullah juga sistem gerejawi yang mulai menekankan sentralisme – bahkan menjadi salah satu alasan dari perpecahan Gereja Reformasi di Belanda.

Catatan menarik tentang jabatan pendeta pada awal gerakan Reformasi adalah bahwa di kalangan Protestan ... *the clerical estate was robbed of its sacral character*. Bila sebelumnya imam dilihat sebagai sosok yang berbeda dengan umat biasa, maka di kalangan Protestan, terutama dengan konsep imamat am orang percaya, sang pendeta tidak terlalu berbeda dengan umat yang lainnya. Sekalipun demikian, pendeta Protestan, di dalam kehilangan aspek sakralnya, tetap perlu memainkan peran tertentu. Berbeda dengan perkembangan yang digerakkan oleh Konsili Trente, di kalangan Protestan seorang pendeta yang ideal justru adalah sama seperti jemaat biasa, yang bekerja, berkeluarga, hanya saja ia harus bekerja dengan lebih baik, dan keluarganya menjadi keluarga teladan untuk dicontoh oleh umat (Schorn-Schütte, 461-464).

Benedict mencatat bahwa unsur kritis dalam reformasi pelayanan gerejawi pada abad XVI adalah upaya mendesain ulang jabatan-jabatan gerejawi menurut gereja apostolis, yaitu dengan cara membuat sang uskup menjadi gembala yang aktif melayani jemaat setempat (Benedict, 431).

Istilah *minister*, yang sering diterjemahkan sebagai pendeta oleh kalangan Protestan, ternyata berlaku bagi keempat jabatan gerejawi yang disebut oleh Calvin, karena secara prinsip para gembala, pengajar, penatua, dan diaken merupakan pelayan (*ministers*). Para penatua dan diaken yang merupakan jabatan tanpa bayaran, bersama dengan gembala dan pengajar, mereka adalah *church ministers* (Benedict, 435).

Gembala yang dalam tradisi Protestan di Indonesia sering disebut sebagai pendeta, berasal dari fungsi yang dijalankan oleh para imam (uskup maupun imam lokal). Bila sebelumnya jabatan ini merupakan jabatan istimewa karena misteri yang dipelihara dan dipertahankan gereja, oleh gerakan Reformasi diubah menjadi profesi yang mensyaratkan pendidikan formal tertentu. Strata sosial Abad-abad Pertengahan yang bertingkat tiga dan menempatkan 'mereka yang berdoa' pada strata teratas, juga diubah. Dari empat strata yang ada sekarang, para pendeta ditempatkan bersama dengan para pejabat sipil dan kaum

aristokrat. Dengan demikian, berakhirlah hak-hak istimewa kaum klerus Abad-abad Pertengahan (Benedict, 436).

Benedict secara kritis menyebut imamat am orang percaya sebagai *lost doctrine of Reformation*. Doktrin ini ketika dikemukakan pertama kali menjadi sesuatu yang sangat menarik dan revolusioner. Namun, setelah 1525, pemberontakan petani, para Reformator – bahkan Luther dan Zwingli, dengan sangat berhati-hati menggunakan doktrin ini, serta menegaskan pentingnya orang belajar teologi dengan baik untuk membaca dan menafsir Alkitab. Dengan demikian, kita bisa mengerti posisi yang kadang tak menentu dari para pendeta Protestan dalam percakapan mengenai doktrin imamat am orang percaya. Dalam sinode Gereja Prancis, tahun 1571, ditegaskan untuk hal-hal yang menyangkut doktrin hanyalah para pendeta dan guru besar teologi yang mempunyai hak suara dalam persidangan.¹⁴ Untuk mendukung kewajiban dan kebutuhan akan adanya para calon pendeta yang memenuhi kualifikasi (menguasai Kitab Suci, menguasai banyak bahasa, menguasai sejarah filsafat, masyarakat, dan gereja), maka pada akhir abad XVI di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum Reformatoris telah bermunculan tidak kurang dari 30 universitas, akademi, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Kemampuan dan pendidikan akademis hanyalah salah satu dari tuntutan yang harus dipenuhi oleh calon pendeta Reformasi. Mereka diharapkan juga mampu menjadi teladan, menegur dan mendidik, menghibur, dan menguatkan mereka yang menghadapi pergumulan hidup, serta mahir berdebat – mula-mula dengan kaum terpelajar dari gereja Roma, dan kemudian juga dengan kelompok-kelompok lain dalam Protestantisme. Dengan tuntutan yang setinggi ini tidak heran kita menemukan catatan seperti ini: keuskupan Utrecht pada akhir abad XV

¹⁴ Saya teringat pengalaman menghadiri salah satu Persidangan Majelis Sinode, ketika baru pulang studi dan menyaksikan seluruh anggota persidangan sinode, termasuk para penatua, ramai-ramai memperdebatkan pasal dan ayat dalam rancangan pegangan ajaran yang harus disahkan oleh persidangan. Dan seperti sudah bisa diduga, argumen dari para penatua sebagian besar bukan argumentasi teologis yang jelas. Bagi saya, yang terasa sangat aneh adalah proses memutuskan butir-butir ajaran dengan cara pengambilan suara, dengan mengikutsertakan para penatua dengan kualifikasi teologis yang tak jelas.

memiliki 18.000 *clergymen*, dan di wilayah yang sama pada abad XVII hanya memiliki 1.542 pendeta (Benedict, 436-440).

Apakah dengan tuntutan yang setinggi ini, gereja setempat dapat mengimbangnya dengan memberikan keamanan ekonomi bagi para pendeta? Data-data historis memperlihatkan bahwa hingga akhir abad XVI dan awal abad XVII belum ada pemberlakuan yang seragam atau mapan menyangkut kesejahteraan para pendeta. Persoalan ini tak jarang menimbulkan konflik antara para pendeta dan jemaat lokal, dan pada jangka panjang para pendeta menjadi selektif dalam menerima panggilan pelayanan. Dari pihak anggota jemaat biasa, kita menemukan catatan berikut: 'ada tiga jenis pendeta Protestan: 1) mereka yang baik dan bijaksana, yang dapat hidup damai dan rukun dengan jemaatnya; 2) mereka yang sangat tegas memberlakukan disiplin; 3) mereka yang sangat terpelajar, sehingga cenderung lebih memperhatikan studinya' (Benedict, 446-451).

Dengan semakin mapannya posisi para pendeta dalam tradisi Reformasi, baik secara teologis, sosial, dan ekonomis, maka mulai abad XVII dan selanjutnya, terjadilah kesenjangan antara para gembala dengan umat. Bagaimana mungkin hal ini terjadi bila sistem pemerintahan gerejawi, setidaknya di kalangan kaum Calvinis sering dianggap sebagai model proto-demokrasi? Justru anggapan seperti inilah yang harus diperbaiki. Para reformator, baik di Jerman maupun di Swiss tidak pernah mengusulkan konsep demokrasi modern sebagaimana yang kita kenal sekarang. Setidaknya dalam tradisi Calvinis sistem yang diusulkan adalah sistem aristokrasi, dengan konsistori yang terdiri dari unsur-unsur anggota masyarakat yang terkemuka.¹⁵ Hal seperti ini tentu mendorong munculnya penolakan dari mereka yang percaya sepenuhnya pada doktrin imamat orang percaya. Sementara di kalangan yang mengikuti tradisi Reformasi yang lebih bersifat aristokratis ini, kita menemukan penjabaran dan pengembangan lebih lanjut dari

¹⁵ Prinsip yang berlaku pada masa itu adalah yang memimpin di masyarakat, juga menjadi pemimpin di dalam gereja.

empat jabatan gerejawi yang dikemukakan Calvin. Para pengajar, banyak yang menerima tahbisan sebagai pendeta, dan tetap bertugas di bidang pendidikan sambil mengawasi perkembangan ajaran di gereja, serta menjadi penasihat dalam persidangan-persidangan gerejawi. Penjelasan Calvin mengenai diaken, sesungguhnya hanyalah salah satu dari penjelasan dan praktik yang ada pada zamannya,¹⁶ sama halnya seperti banyak orang Protestan yang tidak menyadari bahwa diaken adalah jabatan sekular pra-Calvin di Jenewa, bahkan pra-Reformasi yang disesuaikan dengan situasi kontekstual pada masa itu (Benedict, 451-455).

Dalam perkembangan yang membawa gereja-gereja Reformasi semakin meluas dan mapan di beberapa wilayah di Eropa, maka semakin menguatlah sistem presbiterianisme, yang nama sesungguhnya adalah *presbyterial-synodal*. Sistem ini menekankan persidangan gerejawi sebagai kekuasaan tertinggi. Dan dalam praktiknya, utusan dalam persidangan adalah para gembala dan pengajar yang jumlahnya lebih besar daripada para penatua dan diaken. Semakin berbobot kualitas persidangan, semakin bisa diduga bahwa kehadiran dan peran para penatua dan diaken adalah minimal. Sehingga tidak mengherankan mulai ada anggapan bahwa sistem presbiterianisme adalah proses re-klerikalisme, proses kembalinya gereja dikuasai oleh kaum klerus (yaitu para gembala dan para pengajar). Peran para penatua dan diaken justru sangat menonjol pada lingkungan jemaat lokal, terutama menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari (Benedict, 457-459).

Hamm menyatakan ada tiga jenis reformasi: *people's reformation, city reformation, and prince's reformation*. Yang pertama sering dihubungkan dengan reformasi dari bawah, dan dianggap sebagai penyandang nama gerakan reformasi atau versi populer dari gerakan reformasi. Dan dengan kekalahan kaum petani pada 1525, maka gerakan reformasi – dengan dukungan para reformator, seperti Luther, mulai menjadi gerakan yang membutuhkan persetujuan pihak penguasa (*secular authorities*). Peme-

¹⁶ Kalau sekarang tradisi Reformasi memegang penjelasan Calvin, maka inilah kemenangan sejarah dari para pengikut Calvin, sehingga orang tidak menyadari kepelbagaian yang ada pada abad XVI.

rintah yang sah, yaitu pemerintah Kristen bekerja sama dengan para pejabat gereja bersama-sama menjadi aktor dari reformasi mulai pertengahan abad XVI. Semangat awal yang revolusioner tersebut tidak hilang begitu saja, melainkan berlanjut dalam gerakan yang kemudian kita kenal sebagai kaum Baptist dengan ciri kongregasional yang kuat (Hamm, 217-220).

Hamm mencoba mengatasi pendekatan klasik atas studi sejarah reformasi yang punya kecenderungan membentur-benturkan antar kelompok kepentingan, dengan menggunakan konsep dari Peter Blickle *Communal Reformation*. Dalam konsep yang diperkenalkan pada tahun 1985 ini, Blickle menekankan aspek kebersamaan di antara masyarakat yang tak memiliki kekuasaan (sebagaimana halnya para pangeran atau pemerintah kota), namun juga dalam semangat menentang atau melawan para penguasa. Gagasan ini dikembangkan lebih lanjut oleh Hamm dengan menggunakan terminologi klasik dengan cara yang baru, yaitu tidak mempertentangkan reformasi dari atas dengan reformasi dari bawah, sebagai konsep, melainkan mendekati istilah-istilah tersebut secara berbeda (Hamm, 221-223).

Hamm menegaskan bahwa sejak awal gerakan reformasi sudah difasilitasi bahkan didukung oleh para penguasa (dan bukan baru setelah 1526). Pembacaan yang lebih teliti memperlihatkan bahwa gerakan reformasi (1518-1521) malah bukanlah gerakan populer, melainkan gerakan kaum elit terpelajar. Kaum terpelajar inilah yang justru membawa gagasan-gagasan reformasi kepada masyarakat luas. Orang banyak baik melalui traktat (pendekatan tertulis) maupun melalui pidato dan khotbah (pendekatan lisan) menyerap gagasan reformasi yang kritis terhadap situasi gereja dan masyarakat. "Tahap pertama' ini bisa disebut sebagai tahap reformasi yang *adem-ayem*. Tahap berikutnya adalah ketika, gagasan berkembang menjadi agitasi massa, yang antara lain memuncak dalam pemberontakan petani. Barulah pada tahap ketiga peran para penguasa, sebagai aktor yang dominan dalam gerakan reformasi tampil ke permukaan (Hamm, 224-227).

Dengan memperlihatkan ketiga tahapan ini, Hamm mengajukan – selain reformasi dari bawah dan reformasi dari atas – gagasan reformasi dari tengah, yaitu peran kaum terpelajar. Kaum terpelajar ini ternyata sangat beragam. Ada yang sejak awal mempromosikan gagasan supaya reformasi dipimpin oleh para penguasa. Ada juga yang mengajukan gagasan (yang kemudian menjadi doktrin) imamat orang percaya, yang cenderung populis itu. Hamm dengan meyakinkan membuktikan bahwa gagasan klasik mengenai reformasi dari atas dan – dari bawah yang saling dipertentangkan itu sangat simplistik dan tidak berdasarkan realitas. Bahkan sesungguhnya antara – dari atas, – dari bawah, dan – dari tengah, terdapat hubungan kompetitif maupun kooperatif yang rumit dengan sedemikian banyak variasinya (Hamm, 227-231).

Hamm menolak pandangan lama yang menyatakan bahwa sesudah 1526 terjadilah titik balik (*turning point*) dari sejarah reformasi sebagai gerakan umat menjadi reformasi dipimpin oleh para penguasa, dan bahkan para tokoh reformator ditaklukkan atau menaklukkan diri kepada para penguasa. Pandangan seperti ini adalah legenda, dan sama sekali tidak historis. Ia memberi contoh tiga reformator: Zwingli, Bucer, dan Luther. Misalnya, Luther menulis *To the Christian Nobility...* (1520), yang di dalamnya ia menyatakan bahwa imamat orang percaya memberikan kewenangan sah kepada para pangeran sebagai *fellow Christians and fellow priests* untuk menjalankan tugasnya bagi Tubuh Kristus. Sebaliknya Hamm juga memperlihatkan kecenderungan melawan penguasa dan bersikap sektarian bukanlah gejala yang baru meluas sejak 1525. Penolakan atas kooperasi antara para reformator dengan para penguasa sudah bisa dilihat pada Karlstadt, Grebel, dan Manz, serta Müntzer (Hamm, 231-240).

Dengan menggunakan pendekatan baru ini, Hamm memberi perspektif baru dalam membaca sejarah reformasi: kooperasi dan negosiasi di antara tiga aktor. Sesudah 1530-an, ketika suara populer tampak tidak terlalu terdengar, yang sering dibaca sebagai keberhasilan para penguasa membungkam umat secara represif, kini bisa dibaca secara berbeda –

dan data-data dari periode tersebut mendukung cara pandang baru ini. Yaitu telah tercapainya kesepakatan umum yang dapat diterima tiga unsur: penguasa, masyarakat, dan kaum klerus terpelajar. Pada tahun 1530-an, dengan kreativitas dan produktivitas para reformator, teologi reformasi mulai menemukan bentuknya yang lebih jelas, baik dalam bentuk doktrin, pengajaran katekisasi, formula liturgis, tata gereja pertama, dan seterusnya. Dan yang relevan bagi percakapan kita: posisi kaum klerus di dalam tradisi yang muda ini (Hamm, 240-250).

Gejala menarik yang dikemukakan oleh Hamm juga relevan menjadi bahan diskusi kita, yaitu apakah reformasi, dan juga para reformator yang merupakan salah satu aktor penggerak yang penting, merupakan agen kemajuan. Seberapa jauh mereka memberikan visi yang melampaui zaman mereka sendiri? Para reformator sangat jelas dipengaruhi oleh perkembangan paling aktual pada zamannya: semangat humanisme. Semangat pencarian kebenaran yang total dan semangat untuk semakin menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Bisa dikatakan bahwa reformasi justru dilahirkan oleh semangat sekularisasi yang kritis terhadap gagasan dan praktik keagamaan yang ada. Tentu benar juga ada bagian tertentu dari warisan teologis Agustinus yang dikembangkan secara kreatif oleh para reformator pertama (Hamm, 289-291).

Setelah kutipan yang panjang untuk memperlihatkan pengaruh dan perkembangan tradisi yang ada, saya masuk kepada penerapan tradisi tersebut dalam kenyataan yang ditemukan di dalam sejarah kelembagaan. Karena terbatasnya waktu, saya membatasi diri pada GKI dan dengan kasus yang belum terlalu jauh dari ingatan.

Pendekatan Organisasi

Majelis Jemaat GKI terutama dalam perkembangan menurut tata gereja terbaru cenderung tidak memutlakkan jabatan pendeta di dalam aktivitas organisasinya. Kehadiran pendeta lebih diutamakan untuk peribadahan dan pastoralia. Apakah ini sesuatu yang berdasarkan argumentasi teologis dan historis?

Kehadiran pendeta dalam organisasi gerejawi sekalipun menempati posisi strategis, namun bukan menjadi penentu tunggal di dalam proses pengambilan keputusan di GKI. Hal ini merupakan satu unsur penting dari warisan reformasi dengan semangat kepemimpinan kolektif. Namun bagaimana dengan proses pengambilan keputusan menyangkut ajaran? Apakah hanya para pendeta yang memiliki hak suara? Dalam kenyataannya, di GKI, bahkan para penatua yang paling emosional dan irasional pun tetap mempunyai hak suara menyangkut soal penetapan ajaran.

Memang mengabaikan keterlibatan para penatua dalam proses pengambilan keputusan mengenai ajaran akan membuat persoalan baru, yaitu ancaman klerikalisasi di kalangan kepemimpinan gereja. Oleh karena itu, dibutuhkan kematangan dan kedewasaan dari para anggota Majelis Jemaat untuk di satu pihak terus belajar (seperti yang diupayakan oleh BPMK-BPMK dengan Bina Penatua yang rutin dan berjenjang), dan di pihak lain untuk mengakui keterbatasan atas pokok-pokok ajaran tertentu, dan bersedia mendengarkan yang disampaikan para ahli yang mendalami pokok-pokok ajaran tertentu tersebut.

Pokok diskusi kita mengenai teologi jabatan tidak bisa terbatas pada *ngerumpi* mengenai jabatan pendeta. Karena teologi jabatan dalam tradisi reformasi, seperti yang sudah dijelaskan, merupakan kesatuan yang utuh yang berproses secara dinamis.

Beberapa tahun yang lalu ada percakapan mengenai pendeta atau calon pendeta yang akan menikah dengan janda/duda cerai hidup. Bila anggota jemaat – setelah percakapan pastoral yang memadai – dapat diberkati, bahkan juga anggota penatua bisa diperlakukan sama, maka kita inkonsisten ketika melarang bahwa menanggalkan jabatan pendeta atau membatalkan proses kependetaan.

Dalam sejarah kita memang melihat bahwa ada penekanan dari umat untuk para pendeta hidup agar mengikuti idealisme monastik Abad-Abad Pertengahan yang dipaksakan kepada para imam lokal Gereja Katolik Roma: hidup sederhana, mempertahankan kesucian, dan lain

sebagainya. Hal yang sama oleh karena berbagai pengaruh juga rupanya masih hidup subur di lingkungan gereja modern. Dalam tradisi presbiterianisme justru keberanian dan ketegasan konsistori, klasis, bahkan sinode telah membuat tuntutan umat perlahan-lahan mengikuti realitas zamannya. Tentu keberanian dan ketegasan itu bukanlah pemaksaan represif, melainkan sikap yang berdasarkan landasan teologis dan sikap kepemimpinan yang mengayomi yang menuntun umat untuk lebih mampu hidup sebagai Tubuh Kristus di tengah dunia yang penuh gejolak dan dinamika ini.

Melalui satu contoh kasus yang kongkret di GKI tersebut, saya mau mengatakan bahwa ketika perimbangan tiga aktor yang pernah ada dalam beberapa abad pertama dari perjalanan tradisi reformasi *–from above*, *–from below*, dan *–from middle*, sekarang tidak lagi kita miliki. Maka sedikit banyak konsistori harus bermain pada peran *–from above*, dan para pendeta yang memiliki pendidikan yang baik memainkan peran ganda *–from above* (di dalam konsistori) dan sekaligus *–from middle*, sebagai kekuatan intelektual kritis dan kekuatan moral inklusif. Para pejabat gereja yang bukan pendeta harus dibantu agar mampu menjalankan fungsi kepemimpinan, dan bukan terjebak pada prinsip *vox populi vox Dei* (yang dikehendaki umat adalah yang dikehendaki Allah).

Pendekatan Konteks (keindonesiaan dan dunia modern)

Dari pengamatan sederhana, saya berpendapat bahwa GKI memiliki potensi yang memadai untuk mengembangkan lebih lanjut teologi jabatannya dengan memperhitungkan konteks keindonesiaan dan modernitas. Memang ada pengalaman buruk dan kegagalan dalam membuat pilihan-pilihan yang dilakukan oleh para pemimpin GKI di masa lalu dan di masa kini. Sejauh kesalahan tersebut diakui dan dipelajari, kita bisa melangkah lebih baik dalam pengembangan teologi jabatan yang kontekstual.

Foto seorang tokoh GKI pada tahun 1997 mendampingi ketua PGI menyerahkan emas kepada Presiden Suharto, belum hilang dari ingatan. Hal ini merupakan salah satu eksperimen dari penempatan diri gereja (yang diwakili oleh sosok wakil GKI di lingkungan organisasi gerakan keesaan gereja di Indonesia) berhadapan dengan penguasa.

Para pendeta GKI pasti bisa menyebutkan sejumlah contoh lain bagaimana presbiterianisme kita (yang artinya para pendeta juga termasuk di sana, sekalipun tidak setuju dengan keputusan atau tindakan yang diambil) berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sipil, militer, hukum, dan kekuasaan negara. Ada hal-hal yang membanggakan, melegakan, memberi harapan, namun banyak juga yang membuat kita tersipu malu, sedih dan kelu, bahkan tak berdaya.

Apa pun pengalaman dan eksperimen yang kita lakukan, semua itu menunjukkan bahwa sebagai gereja dalam tradisi reformasi kita masih hidup. Yaitu ketika kita memilih untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan. Sekalipun pilihan-pilihan tersebut, yang melewati proses gerejawi bisa salah dan bisa benar. Dan dalam setiap pilihan tersebut, setiap kali juga teologi jabatan kita mengalami definisi ulang.

Daftar Acuan

- Burrows, William R. 1980. *New Ministries – the Global Context*. New York: Orbis Books.
- Benedict, Philip. 2002. *Christ's Churches Purely Reformed*. New Haven & London: Yale University Press.
- Hamm, Berndt. 2004. *The Reformation of Faith in the Context of Late Medieval Theology and Piety*. Leiden & Boston: Brill.
- Kingdon, Robert M. 2007. "The Calvinist Reformation in Geneva" dalam *The Cambridge History of Christianity v.6 – Reform and Expansion 1500-1660*, R. Po-Chia Hsia (ed.), 90-103. Cambridge: University Press.
- Schorn-Schütte, Luise. 2007. "The New Clergies" dalam *The Cambridge History of Christianity v.6 – Reform and Expansion 1500-1660*, R. Po-Chia Hsia (ed.), 444-464. Cambridge: University Press.

Mempingati 500 tahun Reformasi adalah waktu yang tepat untuk melihat ke belakang pada reformasi yang telah dilakukan Luther sekaligus melihat ke depan untuk membarui gereja-gereja agar menjadi lebih taat kepada Tuhan Kepala Gereja dan berpusat pada Alkitab (sola scriptura).

Momentum peringatan 500 tahun gerakan reformasi ini tentu dirayakan dengan berbagai cara di seluruh bumi. Tujuannya adalah untuk mengenang kembali gerakan reformasi pada waktu itu sekaligus memikirkan pembaruan yang akan terus dilaksanakan oleh semua gereja dari waktu ke waktu.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan kedua dari peserta *study tour* dalam rangka mengenang kembali gerakan reformasi. Sedangkan kumpulan tulisan pertama telah diterbitkan sebagai edisi khusus dari Jurnal yang diterbitkan UEM/DEM.

Kiranya buku ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi panggilan sejarah pembaruan yang menjadi tugas generasi kita. Dengan demikian, kita tidak hanya terpesona melihat segala persoalan dan hal-hal besar yang telah terjadi selama 500 tahun terakhir dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan keagamaan, tetapi kita juga dapat secara kritis dan konstruktif memberi diri bagi gerakan pembaruan dalam generasi kita.

